

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan keuangan daerah pada dinas pengelolaan sumber daya air provinsi jawa tengah, penulis menyimpulkan bahwa:

Sistem pengelolaan keuangan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah merupakan pengelolaan yang menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan asas efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai perwujudan asas-asas tersebut Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menerapkannya dalam pengelolaan Dinas. Bentuk dari penerapan efisiensi misalnya pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perencanaan dan program Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Asas transparansi dalam hal ini laporan keuangan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air yang sudah diaudit dan sudah disahkan dapat diakses oleh masyarakat melalui media elektronik sebagai bentuk perwujudan dari asas transparansi. Sebagai bentuk asas akuntabilitas, Kepala Dinas menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Laporan keuangan dan laporan aktifitas tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk mendapatkan pengesahan. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya pemerintah daerah harus membuat penganggaran yang memuat data-data mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah yang lazimnya kita sebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD). Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang kuat harus didukung oleh keuangan daerah yang mantap, sumber daya manusia aparat pemerintah daerah yang berkemampuan, tersedianya sarana dan prasarana pembangunan yang memadai, kelembagaan daerah, ekonomi dan sosial yang kuat, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang tangguh untuk pelaksanaan desentralisasi yang digunakan selanjutnya dalam penyusunan anggaran daerah yang terarah, terencana, transparan dan akuntabel.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah juga mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar terhadap upaya mewujudkan Good Governance. Sejalan dengan upaya perwujudan Otonomi Daerah dan Good Governance, maka tepat untuk memperhatikan masalah akuntabilitas. Akuntabilitas publik dan keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan pemerintah merupakan dampak dari reformasi dan otonomi daerah. Manajemen suatu organisasi apapun dapat dikatakan akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standart yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, menerapkan pemakaian standart serta mengembangkan standart organisasi dan operasi secara efektif dan efisien.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu menindak tegas kepada wajib retribusi yang sering melakukan keterlambatan pembayaran retribusi karena akan dapat menghambat pengelolaan keuangan.
2. Penggunaan Anggaran APBD harus digunakan secara maksimal untuk kepentingan umum sesuai dengan kepentingan yang berlaku. Anggaran yang disediakan untuk instansi hendaknya bukan suatu anggaran top-down, namun button-up artinya berdasarkan usulan dan kebutuhan dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.